

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktek kronisme dalam beroperasinya kapitalisme sebagai agenda investasi proyek reklamasi Teluk Benoa. Mengenai relevansinya dengan praktek *ersatz capitalism* sendiri, penulis melihat kronisme yang berjalan dalam proyek ini merupakan sebuah realitas yang beroperasi dengan menunggangi agenda kapitalisme. Sehingga, agenda kapitalisme berjalan tidak sesuai prinsip, yakni persaingan bebas dan dinamis. Hal ini diakibatkan adanya hak monopoli kawasan Teluk Benoa oleh satu pihak swasta (PT TWBI). Pemberian atas hak monopoli tersebut merupakan bagian konsensus yang sudah dibentuk saat proses politik (Pemilihan Presiden pertama kali) berlangsung terutama pasca otoritarian (Rezim SBY), . Hal ini menandai sebuah pergolakan, bahwa praktek *ersatz capitalism* tidak saja tumbuh dan beroperasi dalam mekanisme politik otoritarian di Indonesia, atau lebih luas di Asia Tenggara seperti yang diungkapkan oleh Yoshihara Kunio. Namun, juga masih beroperasi dan melakukan penyesuaian mekanisme dalam praktek ekonomi – politik pasca otoritarian.

Kata kunci: Kroni Kapital, *Ersatz Capitalism*, Ekonomi Politik, Investasi, Reklamasi Teluk Benoa.

ABSTRACT

This study discusses the practice of cronyism in the operation of capitalism as an investment agenda for the Benoa Bay reclamation project. Regarding its relevance to the practice of ersatz capitalism itself, the authors see that the cronyism that runs in this project is a reality that operates by riding on the agenda of capitalism. Thus, the agenda for capitalism is not in accordance with principles, namely free and dynamic competition. This is due to the monopoly rights of the Benoa Bay area by a private party (PT TWBI). The granting of the monopoly right is part of a consensus that was formed when the political process (the first Presidential Election) took place mainly after the authoritarian regime (SBY Regime). This marks an upheaval, that the practice of ersatz capitalism is not only growing and operating in an authoritarian political mechanism in Indonesia, or more broadly in Southeast Asia as revealed by Yoshihara Kunio. However, it still operates and makes adjustments to the mechanism in post-authoritarian economic-political practices.

Keywords: Crony Capitalist, Ersatz Capitalism, Political Economy, Investment, Benoa Bay Reclamation.

KATA PENGANTAR

Dalam mengawali penjelasan tentang apa yang terjadi pada proyek reklamasi Teluk Benoa, film garapan Dandhy Dwi Laksono yang menjadi sangat fenomenal akhir – akhir ini karena keberaniannya membongkar keterlibatan pejabat negara dalam memonopoli perusahaan di sektor – sektor khusus yaitu batubara. Serta, memperlihatkan paradoks yang terjadi atas apa yang didapat dari konsesi pemerintah dan kroninya dan apa dampak yang didapat oleh masyarakat sekitarnya. Hal ini, membuka mata dan cakrawala kita dalam berdialektika khususnya tentang perkembangan ekonomi – politik pasca Orde Baru. Kita harus selalu peka dalam menghadapi realitas sosial yang berkembang, kejatuhan Orde Baru bukan berarti menghilangkan sejarah yang ada. Bahkan sebenarnya jejak sejarah Orde Baru masih nampak melalui kroni – kroninya bahkan keluarganya terutama anak – anaknya yang masih memegang saham peninggalan bapaknya yaitu Presiden Soeharto. Begitulah mekanisme yang terjadi bahkan pasca Orde Baru atas investasi proyek reklamasi Teluk Benoa di Bali yang dimulai pada tahun 2014 saat rezim SBY.

Setidaknya penulis juga melihat sebuah indikasi yang menarik atas pergolakan yang terjadi akhir – akhir ini dalam masyarakat Bali sendiri atas pembangunan yang ada di Bali. Lebih lanjut, mengenai bagaimana dinamika pemberian sebuah proyek strategis negara kepada sebuah swasta. Dimana, penulis berangkat dari kondisi saat melakukan kuliah lapangan politik di kota yang melihat adanya realitas sosial yang menarik terkait dengan pembangunan yang semakin masif di Bali. Lebih lanjut, gejolak yang muncul mengenai perlawanan atau banyaknya banner – banner penolakan atas reklamasi di Teluk Benoa, penggaungan kembali konsep Ajeg Bali yang berlandaskan ideologi *Tri Hita Karana*, dan pembangunan yang begitu masif di Bali Selatan menjadi sebuah indikasi bahwa apa yang terjadi mengenai dinamika ekonomi – politik di Bali mengalami krisis. Terutama krisis

sosial – budaya, yang dirasa pembangunan yang ada di Bali mengerucut pada proses penghancuran atas nilai – nilai religiusitas. Serta, adanya pergolakan ini juga akibat investor dalam hal ini Tomy Winata yang dianggap memiliki kedekatan dengan rezim SBY, dimana hal ini mengulang memori buruk di masa lalu yakni rezim Orde Baru.

Setidaknya, dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan teori *Ersatz Capitalist*, dimana dalam kontekstualisasinya merujuk pada penekanan konsep kronisme yang masih terjadi pasca Orde Baru. Lebih lanjut, mengenai domain atas teori dan konsep tersebut berangkat dan dilihat menggunakan kerangka otoritarianisme Indonesia, dan Asia Tenggara, yang analisisnya dalam tingkat intervensi negara terhadap mekanisme berjalannya kapitalisme dan tolak ukur seberapa dinamisnya kapitalisme dapat bekerja menyesuaikan lingkungannya. Terutama dalam konteks Bali, dimana tidak pernah lepas dari sejarah Orde baru atas pembangunan dan kapitalisasi atas industri pariwisata. Penguasaan dan monopoli (kronisme) pembangunan atas nama keluarga dalam jaringan politik Orde Baru menjadi catatan buruk atas dinamika ekonomi – politik. Serta catatan buruk mengenai reklamasi pulau serangan menjadi catatan tambahan tentang rezim Orde Baru. Namun, apa yang terjadi pasca Orde Baru juga tak berbeda jauh prakteknya, bahwa praktek kronisme masih terjadi dalam perjalanan kapitalisasi di Bali. Terutama pengincaran atas hak monopoli, proteksi, konsesi, lisensi, dan subsidi atas pemerintah. Selamat membaca, kritik dan saran terbuka sebagai bentuk evaluasi dan diskusi akademik!

Sekian.